

BAB III

STABILITAS KEAMANAN ASEAN

ASEAN merupakan sebuah organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang secara eksplisit dalam Deklarasi Bangkok 1967 menekankan kerjasama di bidang yang menjadi kepentingan bersama para anggotanya, seperti dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik ilmu pengetahuan dan administratif.²¹ Tetapi adanya stabilitas keamanan bagi negara-negara anggota di ASEAN juga tidak bisa diabaikan. Karena menjaga stabilitas keamanan bagi regional ASEAN merupakan tugas yang paling penting untuk menjaga perdamaian dan kerukunan sesama anggota ASEAN. ASEAN juga memiliki peran terpenting dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan.

A. Latar Belakang Berdirinya ASEAN

Peristiwa hubungan internasional di Asia tenggara sejak berakhirnya perang PD II terjadi saat Perang Vietnam dan invansi Vietnam ke Kamboja serta upaya untuk membentuk organisasi regional. Perang Vietnam ini terjadi akibat persaingan AS-Uni Soviet di masa Perang Dingin, invansi Vietnam ke Kamboja setelah Perang Vietnam dimana manifestasi dari

²¹ Rizal Sukma "Menuju Masyarakat Keamanan ASEAN", dalam Joewono. Clara et. Al. (Ed). 75

pengulangan tradisi primitif Vietnam lebih mengarah ke perluasan wilayah dan pengaruhnya dengan cara perang. Upaya membentuk organisasi regional merupakan pola berpikir modern setelah kemerdekaan yang merupakan perkembangan dan sekaligus penolakan tradisi primitif yang menekankan pada peperangan sebagai cara untuk membangun hubungan internasional di kawasan tersebut

Setelah berakhirnya Perang Dunia II timbul fenomena percaturan politik internasional, terlebih di kawasan Asia Tenggara dimana timbul usaha-usaha untuk saling bekerjasama secara internasional. Kerjasama-kerjasama itu salah satunya kerjasama regional, dimana anggota-anggotanya berasal dari kawasan Asia Tenggara sendiri, ataupun organisasi internasional lainnya yang anggotanya berasal dari kawasan Asia Tenggara maupun dari kawasan lainnya. Dari sekian banyak organisasi pemerintahan nasional (*International Governmental Organization*) regional yang lahir pada saat itu salah satunya ialah Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nation – ASEAN*).

Alasan dibentuknya ASEAN merupakan bentuk kesadaran dari negara-negara yang memiliki persamaan, misalnya :

1. Negara-negara di Asia Tenggara dari satu induk bangsa yang sama.
2. Negara-negara Asia Tenggara merupakan negara-negara yang merupakan satu kawasan yang sama dan berdekatan.
3. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara merupakan negara yang sedang

4. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara sama-sama menghasil bahan mentah.
5. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara merupakan negara yang agraris kecuali Singapura dimana industri baru saja berkembang.
6. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara banyak mendapatkan bantuan modal asing dan teknologi modern dengan tujuan untuk membangun ekonomi nasionalnya masing-masing.

Namun ASEAN bukan merupakan organisasi regional yang pertama di kawasan Asia Tenggara, sebelum ASEAN lahir telah ada organisasi-organisasi regional lainnya. Organisasi-organisasi ini beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara ataupun yang memiliki anggota di luar kawasan ini. Seperti SEATO, ASA dan MAPHILINDO. Ada juga organisasi-organisasi lain yang mengembangkan komunikasi sesama negara berkembang, seperti ECAFE / ESCAP, Konferensi Asia Afrika dan Colombo Pan.

Namun terjadi adanya perasaan saling curiga antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara akibat dari konflik Amerika Serikat dan Uni Soviet saat itu. Namun dengan berjalannya waktu perasaan saling curiga antara negara-negara di Asia Tenggara semakin mereda, sehingga mendorong negara-negara tersebut untuk membentuk organisasi kerjasama regional. Berbagai pertemuan konsultatif telah dilakukan secara intensif antara para menteri luar negeri Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand yang kemudian menghasilkan *Joint Declaration* dimana

rancangan ini mencakup kesadaran mengenai pentingnya meningkatkan pengertian untuk hidup bertetangga dengan baik serta kerjasama yang bermanfaat bagi negara-negara yang telah terikat oleh pertalian sejarah dan kebudayaan. Pada 8 Agustus 1967, lima pemimpin departemen Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand duduk bersama di ruangan Utama (*Main hall*) gedung Departemen Luar Negeri di Bangkok, Thailand dan menandatangani sebuah dokumen.²²

Dokumen inilah yang kemudian dikenal sebagai “Deklarasi Bangkok” atau “Deklarasi ASEAN” dan menandai lahirnya organisasi regional baru di kawasan Asia Tenggara, yaitu *Association of South East Asian Nations* (ASEAN).

B. Tujuan ASEAN

Deklarasi Bangkok merupakan sebuah dokumen sederhana yang hanya terdiri dari lima artikel, yang memiliki arti sangat penting bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dokumen inilah yang mendeklarasikan berdirinya sebuah asosiasi untuk kerjasama regional diantara negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang dikenal dengan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) serta menegaskan tujuan dari didirikannya ASEAN.

²²Enil Meida Elana dan Jun Abad, “The Founding of ASEAN” dalam

ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok adalah :

- a. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kebersamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah nasyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai;
- b. Untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- c. Untuk meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi;
- d. Untuk saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, teknik dan administrasi;
- e. Untuk bekerjasama dengan lebih efektif guna peningkatan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, perluasan perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, perbaikan sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi serta peningkatan taraf hidup rakyat-rakyat mereka;

f. Untuk meninjau dan meninjau mengenai Asia Tenggara:

- g. Untuk memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan organisasi-organisasi internasional dan regional dengan tujuan serupa yang ada dan untuk menjajagi segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara erat di antara mereka sendiri.²³

Walaupun ASEAN merupakan suatu organisasi dimana adanya kerjasama regional yang menitik beratkan pada kerjasama di bidang ekonomi, sosial dan budaya., namun Deklarasi Bangkok merupakan komitmen yang tidak luput dari politik negara-negara anggota ASEAN untuk bersatu dan bekerjasama dalam mewujudkan tujuan ASEAN, meskipun pada saat itu kondisi Asia Tenggara diwarnai dengan pergolakan yang terjadi di antara negara-negara di kawasan tersebut, maupun antar kekuatan di luar kawasan. Ide politik yang menjadi dasar dari Deklarasi Bangkok berupaya untuk mewujudkan stabilitas regional yang bisa menunjang pembangunan nasional masing-masing negara anggota Asia Tenggara dalam segala bidang.

C. Stabilitas Keamanan dan Perdamaian di Kawasan ASEAN

Stabilitas regional dikawasan ASEAN, perlu dilakukan dalam berbagai kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama yang terjadi didalam bidang politik dan keamanan dari negara-negara anggota ASEAN

1 .Traktar Persahabatan dan Kerjasama (*Treaty of Amity and Cooperation / TAC*)

Salah satu hal dalam upaya mewujudkan dan menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara merupakan TAC. Prinsip-prinsip yang terdapat di dalam TAC tercermin dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa diantaranya prinsip "*non-interference*" dan cara-cara perdamaian dalam menyelesaikan konflik yang terjadi diantara negara-negara penandatangan TAC.

Dalam Protokol ke-2 Amandemen TAC yang telah ditandatangani oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN dan Papua New Guinea di Manila, 25 Juli 1998 dimana ini menjadi titik awal perluasan TAC ke luar ASEAN. Usaha ASEAN untuk dapat mempertahankan perdamaian dan stabilitas regional mengalami kemajuan yang pesat dibulan Oktober 2003 dengan bekerjasamanya China dan India pada TAC, pada KTT ke-9 ASEAN di Bali, 2003. Selain itu Jepang dan Pakistan bekerjasama dengan TAC tanggal 2 Juli 2004 saat AMM ke-37 di Jakarta. Rusia dan Korea Selatan bekerjasama di Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ASEAN-Rusia dan PTM ASEAN-Korsel, pada bulan November 2004 di Vientiane, Laos. Lalu Selandia Baru dan Mongolia di AMM ke-38 mengaksesi TAC pada bulan Juli 2005 di Vientiane. Serta Australia bekerjasama TAC bulan Desember 2005 di Kuala Lumpur sebelum terselenggaranya KTT ke-11 ASEAN.

Disaat KTT ke-12 ASEAN, Perancis dan Timor Leste

pengakuan pentingnya salah satu negara Uni Eropa (UE) terhadap eksistensi ASEAN serta pentingnya peningkatan kerjasama dengan ASEAN. Bahkan Uni Eropa (UE) telah menyatakan keinginannya untuk mengaksesi TAC. Ini menandakan kemajuan ASEAN sebagai organisasi regional yang signifikan khususnya dalam perkembangan kerjasama kedua kawasan.

Aksesi Cina, Rusia dan Perancis yang merupakan negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, menandakan hubungan yang harmonis terhadap TAC sebagai suatu tata tertib (*code of conduct*) dalam menjalankan hubungan antar negara di dalam dan luar kawasan ASEAN. Hal ini yang membuat ASEAN terus mendorong negara lain di luar kawasan untuk mengaksesi TAC.

2. Kawasan Damai, Bebas dan Netral (*Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration / ZOPFAN*)

Dalam deklarasi ZOPFAN yang telah ditandatangani di Kuala Lumpur pada tahun 1971 merupakan upaya ASEAN untuk dapat menciptakan kawasan yang damai, bebas dan netral dari segala bentuk campur tangan luar di Asia Tenggara. Dalam KTT ke-1 ASEAN tahun 1976, ZOPFAN secara resmi diangkat oleh negara-negara anggota sebagai kerangka bagi kerjasama politik ASEAN.

Namun, ZOPFAN tidak hanya merupakan kerangka perdamaian kerjasama di Asia Tenggara, tetapi juga mencakup kawasan Pasifik yang lebih

1. ... dalam bentuk serangkaian tindak penguatan

diri secara sukarela (*voluntary self-restraints*). Dengan inilah ZOPFAN tidak mengesampingkan peran *major powers*, namun akan memungkinkan keterlibatan mereka secara konstruktif dalam penanganan masalah-masalah keamanan kawasan.

3. Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara (*South East Asia Nuclear Weapon Free Zone / SEANWFZ*)

Pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok *Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone / SEANWFZ Treaty* telah ditandatangani dan telah diratifikasi oleh seluruh negara ASEAN. Traktat ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 1997. SEANWFZ dapat menunjukkan upaya negara-negara di Asia Tenggara untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas kawasan secara regional maupun global, serta dalam rangka mendukung upaya tercapainya suatu pelucutan dan pelarangan senjata nuklir secara umum dan menyeluruh.

Traktat ini disertai protokol yang merupakan suatu legal instrumen mengenai komitmen negara ASEAN dalam upaya untuk memperoleh jaminan dari negara yang memiliki senjata nuklir (*Nuclear Weapon State / NWS*), mereka harus menghormati Traktat SEANWFZ dan tidak akan menyerang negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ASEAN dan NWS pada saat ini masih berupaya untuk finalisasi formulasi beberapa masalah yang diatur dalam Protokol yang dimaksud.

SEANWFZ merupakan aspek yang sangat penting

bagi ASEAN untuk dapat mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang aman dan stabil, serta bagi usaha mewujudkan perdamaian dunia.

Dalam pertemuan AMM ke-32 bulan Juli 1999 di Singapura, para Menlu ASEAN untuk pertama kalinya mengadakan Sidang Komisi SEANWFZ. Ini merupakan langkah yang penting kearah diterapkannya Traktat tersebut. Dalam pertemuan ini, ditunjuklah Komite Eksekutif untuk menyiapkan konsep "*rules of procedure*" dan memulai langkah-langkah yang perlu untuk menjamin ketaatan terhadap Traktat, termasuk konsultasi dengan *International Atomic Energy Agency* (IAEA) dan badan-badan lain yang terkait.

Implementasi SEANWFZ perlu untuk segera dilaksanakan guna mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang aman dan stabil serta upaya mewujudkan perdamaian dunia. Negara-negara anggota ASEAN berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan finalisasi Protokol, dan melakukan langkah yang lebih konstruktif berupa kerjasama dengan IAEA.

4. Forum Regional ASEAN (Region Forum / ARF)

Pada tahun 1994 ASEAN memprakarsai ASEAN Regional Forum (ARE), sebagai forum untuk saling tukar pandangan dan informasi bagi negara-negara Asia-Pasifik dalam masalah-masalah politik dan keamanan, baik regional maupun internasional. Tujuan yang akan dicapai melalui ARF ialah

transparansi dan mencegah kemungkinan timbulnya ketegangan maupun konflik di kawasan Asia Pasifik.

Sebagai satu-satunya forum dialog keamanan di luar PBB, yang dihadiri oleh negara-negara yang memiliki kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat, China, Rusia, Uni Eropa dan Jepang, pembahasan serta tukar pandangan dalam ARF memiliki makna penting dan strategis. Proses ini lebih mencerminkan "*ASEAN Way*", yaitu menjalin hubungan untuk menumbuhkan rasa saling percaya dan kebiasaan berdialog serta berkonsultasi dalam masalah-masalah keamanan.

ARF juga berhasil meningkatkan kenyamanan (*comfortability*) diantara para peserta dalam membicarakan isu keamanan. Salah satu contohnya dimana China telah bersedia untuk membicarakan masalah Laut China Selatan dalam ARF, yang sebelumnya sulit dilakukan. Di masa depan ARF perlu tetap mempertahankan prinsip "*at a pace comfortable to all*" dan consensus. Namun hal tersebut tidak menutup terjadinya perdebatan dalam suasana informal untuk mendukung berlangsungnya pertukaran pandangan yang bersifat terbuka.

Dalam kegiatan-kegiatan antar-sesi di pertemuan-pertemuan ARF, dibagi atas Jalur Satu (*Track I*) yang dihadiri oleh wakil pemerintahan negara-negara ARF, dan Jalur Dua (*Track II*) yang diadakan dan dihadiri oleh lembaga-lembaga penelitian (*think tank*) serta negara-negara ARF. Jalur Satu, memiliki dua jenis kegiatan utama adalah *Intersessional Support Group* (ISG)

... (ISG) yang lebih bersifat teknis. Kegiatan

ISM salah satunya berupa *ISM on Counter-Terrorism and Transnational Crime* (ISM on CT-TC) dan *ISM on Disaster Relief* (ISM-DR).

Kerjasama ARF terbagi atas 3 tahap, proses itu antara lain tahap *Confidence Building Measures* (CBMs), *Preventive Diplomacy* (PD) dan *Conflict Resolution* (CR). ARF melangkah ke tahap kedua sambil tetap melaksanakan tahap pertama. Dalam kaitan tersebut pertemuan ISG, berubah nama menjadi ISG CMBs dan PD.

5. Komunitas Keamanan ASEAN

untuk mempercepat kerjasama politik keamanan di ASEAN serta untuk mewujudkan perdamaian di kawasan, termasuk dengan masyarakat internasional dibentuk Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community / ASC*). Komunitas ini bersifat terbuka, yang pendekatan keamanan komprehensif, serta tidak ditujukan untuk membentuk suatu pakta pertahanan/alianse militer, maupun kebijakan luar negeri bersama (*common foreign policy*). Komunitas Keamanan ASEAN ini mengacu pada berbagai instrumen politik ASEAN yang telah ada seperti *Zone of Peace, Freedom and Neutrality* (ZOPFAN), *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC), dan *Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone* (SEANWFZ) selain menaati Piagam PBB serta prinsip-prinsip hukum internasional terkait lainnya.

Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN disahkan pada

aksi Komunitas Keamanan ASEAN, ditetapkan rencana kegiatan untuk dapat mewujudkan Komunitas Keamanan ASEAN yang terdiri atas 6 komponen, yang diantaranya *Political Development, Shaping and Sharing of Norms, Conflict Prevention, Conflict Resolution, Post-Conflict Peace Building dan Implementing Mechanism*. Rencana aksi ini diintegrasikan ke dalam program AKsi Vientiane (*Vientiane Action Programme / VAP*) yang telah ditandatangani oleh para Kepala Negara ASEAN dalam KTT ke-10 ASEAN.

Mekanisme yang terjadi antara badan-badan sektoral ASEAN yang menangani Komunitas Keamanan ASEAN dilakukan melalui *ASEAN Security Community Coordinating Conference (ASCCO)*.

6. Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*)

Dalam penyusunan Piagam ASEAN memiliki tujuan untuk merubah ASEAN dari sebuah organisasi politik yang longgar menjadi organisasi internasional yang memiliki *legal personality*, yang berdasarkan aturan profesional (*rule-based organization*), serta memiliki struktur organisasi yang efektif dan efisien.

Lahirnya Piagam ASEAN tidak dapat dihindarkan dari serangkaian kesepakatan yang telah dibuat secara sadar oleh para pemimpin ASEAN. Diawali dalam Deklarasi Kuala Lumpur tentang Pembentukan Piagam ASEAN, 17 Desember 2005, yaitu membentuk *Eminent Persons Group (EPG)*, yang bertugas untuk memformulasi rekomendasi dan petunjuk

Print Piagam ASEAN, 13 Januari 2007, membentuk *High Level Task Force* (HLTF) yang bertugas untuk penyusunan draft Piagam ASEAN, negoisasi dan formulasi piagam. HLTF lalu melakukan beberapa pertemuan yang 13 diantaranya, 3 kali dengan ASEAN *Ministerial Meeting* (AMM) serta pertemuan dengan konferensi-konferensi sosial budaya dan ekonomi, politik keamanan, AIPA, Ormas dan LSM. Hasil akhir dari piagam kemudian diadopsi oleh AMM terlebih dulu sebelum mendapat persetujuan dari para kepala negara atau pemerintahan ASEAN dalam KTT ASEAN ke-13 di Singapura, 20 November 2007.

Para pemimpin ASEAN meyakini bahwa stabilitas regional kawasan tidak dapat dilepaskan begitu saja dari stabilitas nasional masing-masing negara anggotanya. Stabilitas regional akan tercipta apabila stabilitas nasional masing-masing negara stabil dan aman. Apabila stabilitas nasional negara anggotanya terganggu, maka stabilitas regional juga akan mengalami gangguan. ASEAN juga berperan aktif dalam menangani masalah-masalah yang dinilai dapat mengganggu stabilitas nasional negara anggotanya, tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi kedaulatan negara-negara yang bersangkutan.

D. Isu Keamanan Non Traditional di ASEAN

Isu keamanan non traditional di ASEAN akhir-akhir ini muncul seiring berkembangnya isu terorisme dan perdagangan manusia. Namun, isu-

ASEAN yang mena-ngani masalah tersebut, termasuk yang dinamakan *ASEAN Ministerial Meeting on Trans-national Crime*.

Isu keamanan non tradisional sudah sangat dipahami sebagai masalah utama yang harus dikelola oleh ASEAN. Bahkan melalui ASEAN, telah mendorong kepedulian kawasan secara lebih luas untuk kita dapat terlibat dalam ASEAN agar berperan secara aktif dalam mengatasi isu-isu keamanan Non-Tradisional. Seperti upaya pemberantasan terorisme, penanganan bencana alam, kerjasama maritim, masalah penyelundupan manusia termasuk *trafickking in person*, masalah keamanan energi dan keamanan pangan, hampir kesemuanya itu merupakan isu keamanan non tradisional. Semua Isu-isu ini telah ditangani dan dikelola oleh ASEAN, melalui lembaga-lembaga ASEAN yang menangani masalah tersebut, termasuk yang dinamakan *ASEAN Ministerial Meeting on Trans-national Crime*.

Dari segi kelembagaan ASEAN, isu keamanan non tradisional sudah sangat dipahami sebagai masalah utama yang harus dikelola oleh ASEAN. Bahkan melalui ASEAN, kita juga telah mendorong kepedulian kawasan secara lebih luas untuk terlibat dalam mengatasi masalah-masalah non tradisional tersebut melalui forum *ASEAN plus*, kerja-sama ASEAN dengan negara-negara mitranya, ASEAN-China, ASEAN-Jepang, ASEAN-Australia, ASEAN-Amerika, dan *ASEAN plus three*, juga melalui yang

Sepanjang menyangkut masalah *non-traditional security issues*, sudah ada kepekaan yang cukup mendalam di antara negara-negara ASEAN untuk mengelola masalah ini ke depan, bukan saja antara sesama negara ASEAN, melainkan juga ASEAN dengan negara mitranya, ASEAN dalam kerangka *ASEAN Regional Forum*, dan tidak kalah penting ASEAN dalam kerangka yang dinamakan *East Asia Summit*.

Setidaknya terdapat tiga paradigma yang menjadi basis dari penanganan masalah-masalah Non-Tradisional oleh ASEAN.

Pertama, paradigma yang melandasi penanganan ASEAN terhadap masalah-masalah non-tradisional adalah adanya suatu kenyataan bahwa antara masalah dalam negeri dan masalah luar negeri ada keterkaitan yang sangat erat. Dan bahkan, di abad ke-21 ini kadang kala mustahil dan sulit membedakan antara apa yang dinamakan masalah dalam negeri dan apa yang dinamakan masalah luar negeri. Satu contoh untuk menggambarkan adanya keterkaitan antara masalah dalam negeri dan masalah luar negeri, yaitu yang dinamakan *democratic deficit*, kekurangan-kekurangan atau keterbatasan masalah demokrasi dan *good governance* dari suatu negara bisa dengan sangat cepat berkembang menjadi masalah keamanan/*security*.²⁴

Paradigma kedua, adalah adanya keterkaitan yang sangat erat antara berbagai permasalahan internasional. Di masa lalu kita terbiasa membedakan suatu permasalahan sebagai masalah politik, ekonomi, sosial-

²⁴ DR. R.M. Marty M. Natalegawa, "Hubungan Internasional Membutuhkan Pendekatan *"Thinking Outside the Box"* dalam <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/171-mei->

budaya, penerangan, dan lain-lain, sehingga seolah-olah penanganan suatu masalah bisa dilakukan dalam suatu kevakuman secara berdiri sendiri. Kenyataannya, apapun permasalahannya, antara satu masalah politik, ekonomi, sosial-budaya, semua saling terkait dan sangat tidak mungkin bisa dipisahkan.

Dalam hubungan internasional semua masalah global memiliki dimensi keamanan. ketika kita membahas masalah pangan, kita bisa berbicara tentang masalah keamanan pangan atau *food security* dan begitu juga untuk masalah lain seperti *climate security*, *environment security*, dan *financial security*.²⁵

Paradigma ketiga, meskipun sekarang sangat sering kita membahas masalah-masalah *non-traditional security* seperti masalah *food security*, *environment security*, *finance security*, *counter-terrorism*, *disaster management*, dan lain-lain, dengan ciri-cirinya seperti keterkaitan masalah global, internasional dan domestik, serta keterkaitan antara berbagai masalah hukum, dalam kenyataannya, masalah-masalah yang dinamakan *traditional security* masih sangat menjadi perhatian kita semua.²⁶

E. Konflik Internal Negara-Negara Anggota ASEAN

Adanya bermacam-macam suku dan budaya bahkan agama yang tersebar di kawasan ASEAN, sehingga membuat negara-negara anggota ASEAN ini rawan dengan konflik internal. Bahkan hampir semua negara

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

anggota ASEAN mengalami konflik internal yang hingga membuat negara-negara tetangga mendapatkan dampaknya, misalnya dengan adanya dampak pengungsian. Negara-negara yang pernah mengalami konflik internal antara lain :

1. Burma (Myanmar)

Konflik internal yang terjadi di Myanmar (Burma) terjadi sejak masa kerajaan hingga masa transisi sekarang. Seperti masalah Rohingya yang hingga melibatkan negara-negara tetangganya seperti Thailand, Indonesia, Malaysia dan negara-negara tetangga lainnya. Konflik Rohingya ini sebenarnya konflik antara 2 suku yang terjadi sudah sejak lama di tanah Arakan. Dimana suku Rakhine tidak ingin mengakui masyarakat Rohingya sebagai bagian masyarakat Burma.

Adanya perbedaan fisik hingga agama yang dianut membuat masyarakat Rohingya ini mengalami tindakan tidak manusiawi dari negaranya sendiri Myanmar. Etnis Rohingya mengalami intoleransi karena mereka muslim dan identitas etnis dan ciri-ciri fisik dan bahasa mereka dianggap berbeda dengan mainstream. Oleh karenanya, mereka selalu menjadi subyek penyiksaan utamanya sejak 1962, ketika rezim militer U Ne Win mengambil alih pemerintahan negara Burma.²⁷

Konflik ini memuncak pada tahun 2012 ini terjadi sebanyak dua kali, yakni pada bulan Juni dan terulang kembali pada bulan oktober. Pada

²⁷ Heru Susetyo & Nurul Islam, "Rohingya 101 : Sejarah, Masalah, Kekerasan dan Tuntutan",

Oktober 2012, konflik kembali terjadi. Terjadi pembantaian besar-besaran terhadap etnis Rohingya sehingga mengakibatkan pengungsian besar-besaran juga di kawasan ASEAN. Berawal dari terbunuhnya seorang gadis dari suku Rakhine yang diduga dilakukan oleh pemuda Rohingya. Sehingga menimbulkan reaksi balas dendam dan membantai etnis Rohingya secara besar-besaran. Hingga populasi etnis Rohingya ini menurun drastis.

Kasus ini menjadi perhatian dunia akibat pelanggaran HAM yang besar. Sehingga sebenarnya konflik ini merupakan pukulan terbesar bagi ASEAN. Namun ASEAN tidak dapat berbuat banyak karena konflik ini merupakan konflik internal dan adanya prinsip non interferensi yang berlaku di kawasan ASEAN.

President Myanmar Thein Sein telah memperburuk krisis Rohingya Arakan dengan mengatakan bahwa : *"Rohingya are not our people and we have no duty to protect them."* Ia menginginkan supaya etnis Rohingya dikelola oleh UNHCR saja atau ditampung di negara ketiga yang mau menampungnya. Dia menyebut etnis Rohingya di Arakan sebagai : *a 'threat to national security'*.²⁸

Hingga saat ini, konflik Rohingya ini masih menjadi perhatian penting bagi ASEAN bahkan PBB. Pelanggaran HAM yang semakin

Kasus ini bahkan mendorong aksi demonstrasi besar-besaran di negara-negara tetangga seperti Indonesia dan Malaysia.

2. Thailand

Berawal dari adanya peraturan-peraturan pemerintah Thailand yang dimana salah satunya peraturan baru pemerintah yang mengharuskan pesantren-pesantren di Thailand Selatan untuk mengadopsi pendidikan sekuler. Hal ini mendapat penolakan dari Ustad Haji Abdul Karim Hassan yang kemudian beliau mendirikan Barisan Revolusi Nasional (BRN) pada tahun 1960. Namun ternyata gerakan ini kurang mendapat perhatian dan dukungan dari masyarakat Thailand Selatan sehingga membentuk gerakan baru yang bernama Pattani United Liberation Organization (PULO). PULO dalam perkembangannya berhasil menarik minat masyarakat Thailand Selatan karena selain melakukan perlawanan senjata, kelompok tersebut juga gencar melakukan aneka kegiatan sosial untuk meningkatkan taraf pendidikan & kesejahteraan para penduduk lokal.²⁹

Setelah munculnya PULO, banyak bermunculan gerakan-gerakan di Thailand Selatan dalam hal anti Thailand. Ini dikarenakan Pattani yang merupakan daerah Thailand Selatan yang mayoritas memiliki masyarakat penganut agama Islam menginginkan melepaskan diri dari Thailand dan ingin membentuk negara sendiri dengan berbasis negara Islam.

²⁹ "Sejarah Konflik Berdarah di Thailand", dalam <http://republik->

Banyak terjadi pergolakan dan hingga saat ini masih terjadi. Hal ini membuat banyak masyarakat Thailand Selatan untuk bermigrasi ke negara-negara muslim di kawasan ASEAN seperti di Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia.

3. Kamboja

Kamboja merupakan salah satu negara di kawasan ASEAN dan juga merupakan salah satu anggota dari ASEAN. Kamboja sama dengan negara-negara anggota ASEAN yang lainnya yang memiliki berbagai konflik. Baik konflik eksternal dengan Vietnam dan Thailand, namun juga konflik internal.

Adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia pada perempuan di masa pemerintah Hun Sen. Dengan terjadinya konflik politik internal terhadap partai oposisi dan partai pemerintah di Kamboja pada masa pemerintahan Hun Sen yang dikenal otoriter, maka serangan yang dilakukan terhadap anggota partai dan rakyat sipil mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terutama kaum perempuan dimana dalam hal ini akan dengan sendirinya berpindah fungsi sebagai kepala keluarga. Belum lagi akibat-akibat lain yang menimpa para kaum perempuan di Kamboja, antara lain adalah terjadinya pembunuhan massal, prostitusi, perdagangan perempuan, kerja paksa, aborsi yang disebabkan oleh kehamilan yang tidak diinginkan, perkosaan dan masih banyak lainnya yang juga masih berlangsung hingga saat ini. Peristiwa Genosida yang terjadi di Kamboja

sejauh mana peristiwa tersebut berlangsung, meskipun dalam hal ini PBB telah melakukan misi perdamaianya (*United Nation Peace Plan*) guna meminimalisasi terjadinya konflik dan korban-korban akibat konflik tersebut. Pergantian pemerintahan di Kamboja dari masa Lon Nol, Pol Pot, hingga Hun Sen, ternyata tidak memberikan keadaan yang lebih baik bagi rakyat Kamboja.³⁰

4. Filipina

Agama Islam di Filipina merupakan agama terbesar yang kedua. Sedangkan agama yang mendominasi atau mayoritas di Filipina adalah agama Katolik. Minoritas Muslim di Filipina dikenal dengan sebutan Muslim “Moro” (sebutan orang-orang Islam), komunitas Muslim Moro tersebut tinggal di kepulauan Mindanao dan Kepulauan Sulu.

Sejak tahun 1960-an sampai awal 1970-an, terjadi perlawanan antara pendatang Kristen Filipino bagian utara Filipina dan penduduk asli masyarakat Muslim Moro di wilayah Mindanao bagian selatan Filipina. Perlawanan tersebut berawal dari adanya perpindahan penduduk Kristen ke tempat tinggal orang-orang Islam di Mindanao. Dampak dari peristiwa tersebut banyak tanah-tanah kepunyaan orang-orang Islam di Mindanao diduduki dan dimiliki secara paksa oleh pendatang Katolik. Permasalahan

³⁰Diah Puspita Sari, “Dampak Konflik Internal Terhadap Pelanggaran HAM Perempuan Di Kamboja (Periode Tahun 2002-2003)”, dalam [”http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zEKhpN37RsgJ:sippm.unas.ac.id/page/download.](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zEKhpN37RsgJ:sippm.unas.ac.id/page/download)”

tanah tersebut menandai semakin memuncaknya konflik antara Muslim Moro dan Katolik Filipina. Akibat dari konflik tersebut, melahirkan organisasi-organisasi dari kelompok Katolik pendatang dan penduduk asli Muslim Moro di Mindanao.³¹

Berbagai gerakan muslim di Filipina mulai berkembang. Yang menjadi terkuat saat ini ialah gerakan Kelompok Abu sayyaf terbilang kecil, tetapi kelompok ini telah berhasil menguncang kestabilan negara Filipina dengan melakukan pengeboman-pengeboman di daerah-daerah Filipina. Konflik yang diusung oleh gerakan ini memang konflik antar agama, dimana kristen sebagai mayoritas dan islam sebagai minoritas. Kelompok Abu sayyaf berjuang untuk membebaskan umat Muslim Moro dari penjajahan orang-orang Kristen, karena bila dilihat dari sejarahnya, Filipina pernah menjadi sebuah negara kesultanan Islam Sulu yang pernah Jaya di negara tersebut. Faktor inilah yang menjadi dasar dari orang-orang Moro melakukan perjuangan untuk membebaskan diri dari negara Filipina.

Hingga saat ini keberadaan Kelompok Abu Sayyaf tetap ada di Filipina, berusaha mendirikan negara Islam adalah cita-cita mereka. Solusi telah banyak ditawarkan oleh pemerintah Filipian, tetapi kelompok ini tidak dapat menerima cara-cara damai dan lebih memilih perang. Pemerintah Filipina dan Amerika telah berusaha untuk melakukan penghentian terhadap gerakan ini namun kelompok ini tetaplah sulit untuk dimusnahkan, karena

³¹ http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3iMgItSq_icJ:digilib.sunan-ampel.ac.id/files/disk1/208/jiptiaain-nurdianah-10396-2-minorita-%29.pdf&cd=7&hl=id&ct=clnk&gl=id, diakses 2 Juni 2013 pukul 16.18 WIB

mereka melakukan cara-cara gerilliya dalam gerakannya.³² Tujuan dari gerakan ini ialah ingin mendirikan negara muslim di Filipina.

5. Malaysia

Negara Malaysia setelah kehilangan kawasan Singapura, sering mengalami konflik dengan negara-negara tetangganya seperti Indonesia dan Filipina. Lebih sering konflik dengan negara-negara ini ialah konflik perebutan wilayah. Dimana Malaysia selalu merasa bahwa wilayah yang disengketakannya merupakan wilayah teritorialnya.

Namun selain seringnya pemberitaan tentang konflik dengan negara-negara tetangga, sebenarnya Malaysia juga mengalami konflik internal yang cukup rumit. Yang terjadi baru-baru ini ialah masalah pemilu yang terjadi di Malaysia. Setelah diumumkannya pembubaran parlemen oleh Najib Razak dan mulai bersiap untuk menghadapi pemilihan umum. Terjadi kekacauan dimana sebagian besar pihak masyarakat Malaysia merasa ada manipulasi data hasil pemilihan umum yang dimenangkan kembali oleh Abdul Razak. Ratusan ribu warga Malaysia mencurigai adanya kecurangan pada Pemilu Malaysia ke-13 yang digelar Ahad, 5 Mei 2013. Mereka pun bersuara lantang di dunia virtual dengan mengajukan petisi melalui Change.org. Dalam sehari, tercatat sudah ada 150 ribu warga Malaysia yang menandatangani petisi tersebut. Mereka menuduh telah terjadi kecurangan

³² Avarusyd, "Gerakan Abu Sayyaf", dalam <http://avarusyd.wordpress.com/2011/09/07/gerakan-abu-sayyaf/> diakses 2 Juni 2013 pukul 16.22 WIB

besar pada pemilu dan meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan intervensi dan investigasi.³³

Terjadi demonstrasi diberbagai penjuru dimana mereka menilai pemilu Malaysia ke-13 ini merupakan kecurangan terbesar. Rakyat Malaysia merasa ini merupakan manipulasi hasil pemilu yang sangat fatal. Pemilihan umum Malaysia ke 13 kali ini memang merupakan pemilihan yang terpanas dalam sejarah Malaysia. Barisan Nasional menang dengan merebut 133 kursi parlemen dari 222 yang diperebutkan. Namun, dalam perhitungan jumlah pemilih (*popular vote*), mereka kalah dibandingkan oposisi.³⁴

6. Indonesia

Indonesia merupakan negara paling rawan dengan konflik internal. Beberapa faktor seperti wilayah teritorial yang paling luas dikawasan ASEAN serta banyaknya suku, budaya dan agama yang beragam membuat konflik internal sangat rawan di negara ini. Sudah banyak kasus yang menjadi sorotan dunia Internasional di negara ini.

Dari terorisme hingga gerakan pemisahan diri dari negara republik Indonesia. Pada tahun 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa dan kalangan masyarakat diberbagai wilayah di Indonesia karena naiknya Soeharto sebagai presiden untuk kesekian kalinya. Peristiwa ini

³³ Munawwaroh, "Warga Malaysia Ajukan Petisi Kecurangan Pemilu", dalam <http://www.tempo.co/read/news/2013/05/07/118478508/Warga-Malaysia-Ajukan-Petisi-Kecurangan-Pemilu>, diakses tgl 2 Juni 2013 pukul 17.38 WIB

³⁴ Sandy Indra Pratama dan Anne Muhammad, "Ratusan Ribu Oposan Marah di Selangor", dalam

berakhir dengan lengsernya Soeharto sebagai presiden dan naiknya B.J Habibie yang merupakan wakil presiden saat itu.

Yang pernah menjadi sorotan dunia internasional adalah saat meletusnya bom Bali dimana banyak wisatawan asing ikut menjadi korban dari bom teroris tersebut. Bom Bali 2002 (disebut juga Bom Bali I) adalah rangkaian tiga peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. Dua ledakan pertama terjadi di Paddy's Pub dan Sari Club (SC) di Jalan Legian, Kuta, Bali, sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat Kantor Konsulat Amerika Serikat, walaupun jaraknya cukup berjauhan. Rangkaian pengeboman ini merupakan pengeboman pertama yang kemudian disusul oleh pengeboman dalam skala yang jauh lebih kecil yang juga bertempat di Bali pada tahun 2005. Tercatat 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera, kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi yang merupakan tempat wisata tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia.³⁵ Setelah bom Bali 1, kembali terjadi bom Bali 2 yang kemudian mulai terjadi beberapa kali aksi bom teroris di Indonesia.

Selain itu beberapa konflik juga terjadi yang didalangi oleh beberapa kelompok kepentingan. Seperti adanya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berada di Aceh. Dimana gerakan ini ingin mendirikan negara Islam sendiri. Kemudian Papua yang ingin mendirikan negara bagian sendiri.

³⁵ "Bom Bali 2002" (11/10/2002). http://id.wikipedia.org/wiki/Bom_Bali_2002 diakses 3 Juni 2013 pukul

Indonesia juga pernah kehilangan wilayahnya saat Timoer-Timoer melepaskan diri dari Indonesia dan mendirikan negara baru Timoer Leste.

Tidak hanya itu saja konflik yang terjadi di Indonesia juga melibatkan konflik antar suku dan agama seperti di Poso dan Sampit. Banyak nyawa melayang saat terjadi konflik tersebut. Hal ini tentu menjadi tugas yang sangat berat bagi pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik suku dan agama, dimana Indonesia sendiri terdiri dari berbagai suku dan agama yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.